

# **RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2025**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2023	6
2.1. EVALUASI PELAKS. RENJA & CAPAIAN RENSTRA.	6
2.2. ANALISIS KINERJA & PELAYANAN DLH.....	23
2.3. ISU-ISU PENTING PENYEL. TUGAS & FUNGSI.....	24
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	25
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM & KEGIATAN MASYARAKAT	26
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN.....	27
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	27
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DLH.....	28
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN .....	29
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLH .....	53
BAB V : PENUTUP .....	57

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, itulah kata pujian yang sepatasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Rencana Strategik (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar. Ruang Lingkup pembahasan memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kemudian dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, diharapkan dapat menjadi acuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kami berharap kepada semua pihak kiranya dapat memberikan saran yang konstruktif demi penyempurnaannya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda. Amin !

Demikian, dan terima kasih.

Benteng, 05 Juni 2024  
KEPALA DLH,



**MUH. TAUFIK KADIR, ST.,M.M**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720303 200604 1 020

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen RENJA yang disusun setiap tahunnya memuat evaluasi program, kegiatan dan pendanaan indikatif pada tahun sebelumnya serta rencana untuk tahun yang akan datang, baik program dan kegiatan rutin maupun strategis. Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokumen rencana pembangunan berdimensi satu tahun, guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan publik yang sudah dicapai sesuai dengan tupoksi. Rencana Kinerja (Renja) ditetapkan untuk menjadi dasar penyusunan RKA-DLH Kabupaten Kepulauan Selayar. Rencana Kerja (Renja) menggambarkan berbagai indikator yang diklasifikasikan sehingga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam kurun waktu satu tahun.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renvana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 128 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar;
19. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk menjadi komitmen bersama bagi pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar tugas pokok dan fungsi SKPD.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Sebagai bahan masukan dalam menyusun dan menetapkan rencana kerja anggaran.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, memuat uraian latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DLH TAHUN 2023, memuat evaluasi pelaksanaan renja DLH Tahun 2023 dan capaian Renstra DLH, analisis kinerja pelayanan DLH, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja DLH, program dan kegiatan.
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN, memuat rencana program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta besaran pendanaannya.
- BAB V : PENUTUP, memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA DLH TAHUN 2023

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA DLH

Evaluasi kinerja merupakan penilaian keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kegiatan evaluasi pencapaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja kegiatan, dan membandingkannya dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian kinerja renstra didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan renstra dan digunakan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Analisis pencapaian kinerja dilaksanakan melalui telaahan/kajian yang mendasar tentang berbagai faktor kunci keberhasilan atau kegagalan. Hal ini penting dalam menyikapi kinerja organisasi ke depan, sehingga keberhasilan yang diraih dapat ditingkatkan dan kegagalan yang terjadi mendapat solusi yang tepat.

Secara garis besar, capaian kinerja Dinas Lingkungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Capaian Kinerja Tahun 2023**

No.	Sasaran					Persentase Capaian (%)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air (IKA)	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah kondisi kalitatif air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	54,00	51,18	94,78	Baik
		Indeks kualitas udara (IKU)	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu	85,49	90,71	106,11	Sangat Baik
		Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Penghitungan indeks kualitas tutupan hutan diawali dengan melakukan penjumlahan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi	45,06	37,76	83,80	Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah Pedesaan	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	IKPS adalah perhitungan indeks pengelolaan sampah melalui aplikasi SIPSN dengan data dari sumber sampah, timbulan sampah, komposisi sampah , karakteristik sampah dll.	35,08	43,72	138,88	Sangat Baik

Sedangkan Evaluasi dan analisis hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

**Sasaran :**  
**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel indikator kinerja di bawah ini :

**Tabel 2.2 :**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	52,00	55,56	106,85	54,00	102,89
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,39	88,73	103,91	85,49	103,79
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	42,57	37,29	87,60	45,06	82,76
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>99,45</b>		<b>96,48</b>

**Indikator (1) Indeks Kualitas Air (IKA)**

Kinerja nyata dengan indikator Indeks Kualitas Air (IKA) pada Tahun 2022 adalah sebesar 50,00. Sehingga persentase capaian kinerjanya 106,85% jika dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan. Capaian ini telah mencapai target bahkan melebihi target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 seperti yang diuraikan pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	52,00	55,56	106,85	54,00	102,89

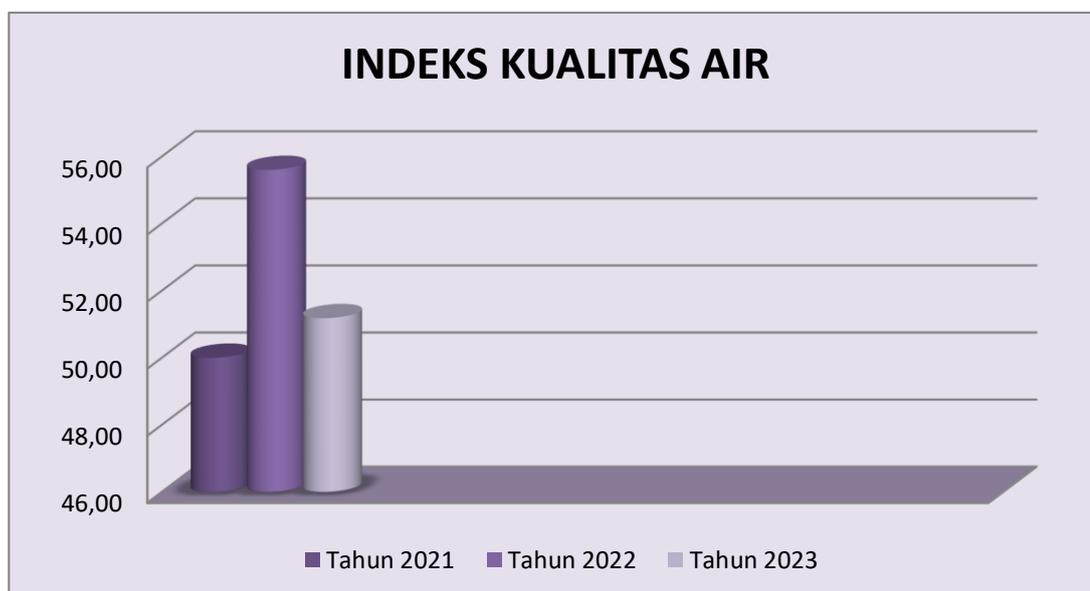
Realisasi kinerja tahun ini meningkat 5,56 Point, sehingga terjadi peningkatan kinerja sebesar 7,84 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Sedangkan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun ini, jika dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 sudah mencapai kinerja sebesar 102,89 %. Sehingga upaya yang diperlukan untuk mencapai target akhir renstra adalah meningkatkan aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, limbah B3 serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan.

Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2021 s/d Tahun 2023, dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.3 :**  
**Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air**  
**Tahun 2021 s/d Tahun 2023**

No	Tahun Renstra	IKA		%
		Target	Realisasi	
1	2021	50,50	50,00	99,01
2	2022	52,00	55,56	106,85
3	2023	54,00	51,18	94,78

Perkembangan Indeks Kualitas Air Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 s/d 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



### Indikator (2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Kinerja nyata indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2022 adalah sebesar 88,73. Sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103,91% jika dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan. Capaian ini telah melebihi target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai rincian tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023	%
			Target	Realisasi		Target	
1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,39	88,73	103,91	85,49	103,79

Realisasi kinerja Tahun ini meningkat 1,57 Point, sehingga terjadi peningkatan kinerja sebesar 5,28 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Sedangkan Nilai Indeks Kualitas Udara tahun ini, jika dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026, maka capaian kinerjanya mencapai 103,79%. Sehingga upaya yang diperlukan untuk mencapai target akhir renstra adalah meningkatkan strategi pengelolaan persampahan, meningkatkan pendidikan dan penyuluhan lingkungan kepada masyarakat untuk mempertahankan kualitas udara. Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2021 s/d Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4 :**  
**Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara**  
**Tahun 2021 s/d Tahun 2023**

No	Tahun Renstra	IKU		%
		Target	Realisasi	
1	2021	88,80	87,16	98,15
2	2022	85,39	88,73	103,43
3	2023	85,49	90,71	106,11

Perkembangan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 s/d 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



#### Indikator (3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Kinerja nyata indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2022 adalah sebesar 37,29. Sehingga persentase capaian kinerjanya 100 % jika dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan. Capaian ini tidak memenuhi target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

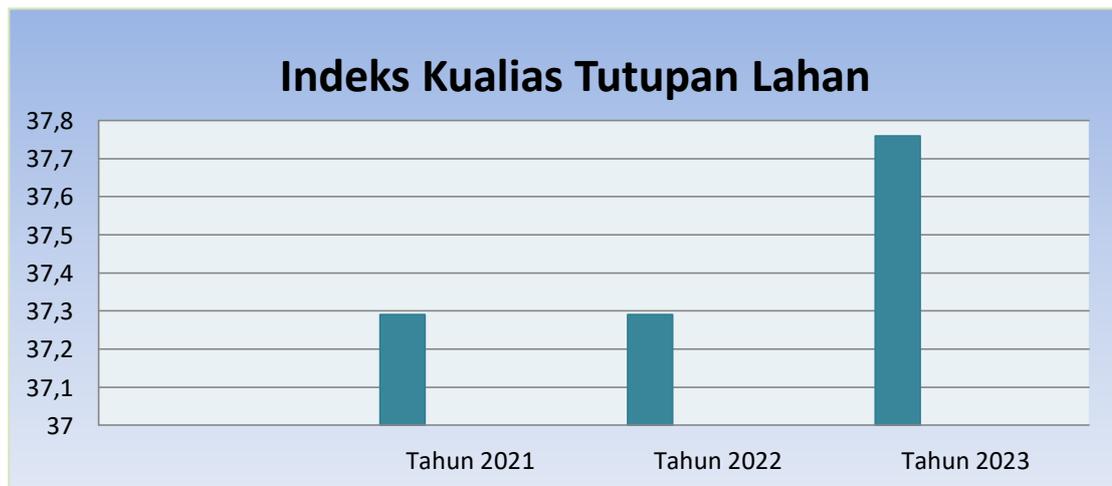
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023	%
			Target	Realisasi		Target	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	42,57	37,29	87,60	45,05	82,76

Realisasi kinerja tahun ini tetap, sehingga tidak terjadi peningkatan/penurunan kinerja jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Sedangkan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun ini, jika dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 mencapai kinerja sebesar 82,76 %. Sehingga upaya yang diperlukan untuk mencapai target akhir renstra adalah meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau. Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2021 s/d Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6 :**  
**Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan**  
**Tahun 2021 s/d Tahun 2023**

No	Tahun Renstra	IKTL		%
		Target	Realisasi	
1	2021	89,12	37,29	41,84
2	2022	42,57	37,29	87,60
3	2023	45,06	37,76	83,80

Perkembangan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2021 s/d 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Berdasarkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022, maka dapat diketahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (\text{IKA} \times 30\%) + (\text{IKU} \times 30\%) + (\text{IKTL} \times 40\%) \\
 &= (55,56 \times 0,376) + (88,87 \times 0,405) + (37,29 \times 0,219) \\
 &= (20,89) + (35,94) + (8,16) \\
 &= \mathbf{64,99}
 \end{aligned}$$

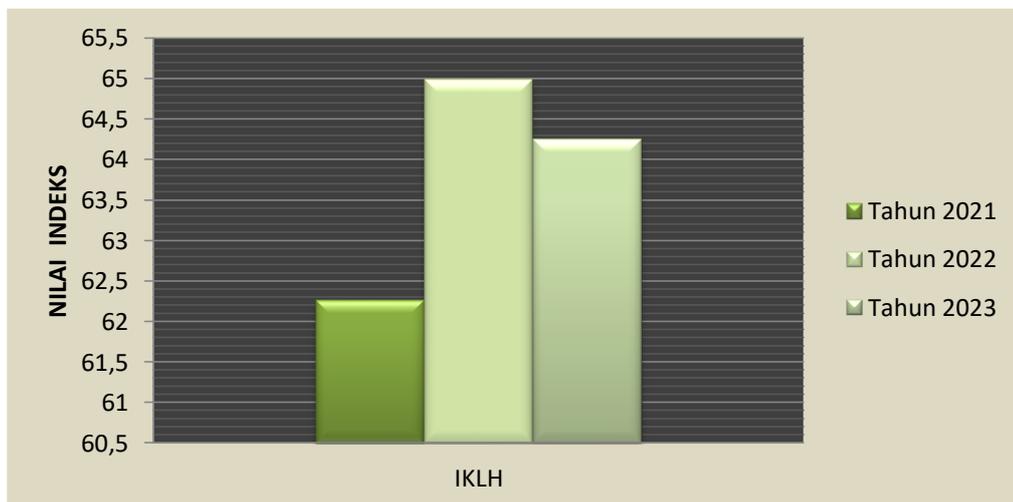
IKLH pada Tahun 2022 ini didukung oleh Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 55,56, Indeks Kualitas Udara (IKU) 88,87, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 37,29. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7 :**  
**Data perbandingan IKA, IKU, IKTL, IKLH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**Tahun 2021 s/d Tahun 2023**

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2021	50,00	87,16	37,29	62,27
2022	55,56	88,87	37,29	64,99
2023	51,18	90,71	37,76	64,25

Sumber : DLH Tahun 2023

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021 s/d 2023, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya Bank Sampah yang dikelola secara aktif;
2. Adanya program pemerintah dalam mewujudkan Kota Sehat/Adipura;
3. Adanya kebijakan pemerintah daerah berupa Peraturan Bupati tentang JAKSTARADA dan Perbup tentang Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah;
2. Tidak adanya keseimbangan antara penanaman pohon dengan sumber kadar karbon monoksida (CO);

3. Banyaknya pemakaian pupuk pestisida dalam sektor pertanian;
4. Kurang memadainya sarana dan prasarana persampahan, baik kualitas maupun kuantitas.

**Sasaran :**  
**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah Pedesaan**

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan sampah pedesaan dapat dilihat dalam tabel indikator kinerja di bawah ini :

**Tabel 2.2 :**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah Pedesaan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	Angka	35,04	43,06	122,89	35,08	122,75
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>122,89</b>		<b>122,75</b>

**Indikator (1) Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)**

Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Sampah (IKPS) pada Tahun 2022 yaitu 43,06 sehingga capaian kinerjanya adalah 122,89 % jika dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan. Capaian ini telah melebihi target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS) Tahun 2021 s/d Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4 :**  
**Capaian Kinerja Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah**  
**Tahun 2021 s/d Tahun 2023**

No	Tahun Renstra	IKU		%
		Target	Realisasi	
1	2021	N/A	N/A	N/A
2	2022	35,04	43,06	122,89
3	2023	35,08	48,72	138,41

Untuk lebih jelasnya, Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 sesuai Format terlampir pada Juknis.

Tabel 2.8  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan  
Pencapaian Renstra DLH s/d Tahun 2023  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	11									
		Urusan Lingkungan Hidup								
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	12,50	37,50	12,50	11,25	300	12,50	11,25
		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Rencana PPLH terevaluasi	12,50	50,00	12,50	11,25	100	12,50	11,25

			(RPPLH) Kabupaten/Kota									
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	2,59	2,59	2,59	7,90	38,40	2,59	2,01	77,61
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian yang Memenuhi Baku Mutu	10	7,14	14,29	0	0	2,59	2,59	100
			Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	25	0,00	0,02	0,037	185	25	25	100
			Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	0,047	0,002	0,02	0,037	185	0,047	0,047	100
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (%)	1,38	1,38	1,37	0,005	0,30	1,38	1,39	100,72

			Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola	2,31	2,30	1.858,51	1.884,97	101,40	2,31	2,31	100
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Lembaga/Perusah aan penghasil Limbah B3 yang Diawasi (%)	100	100	0,02	0,018	90	100	100	100
			Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang disimpan sementara	9,25	0	5.220	9.245,65	177,10	9,25	9,25	100
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	64	63,64	40	4,35	10,80	64	51,20	93,75
			Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin	Rasio Pejabat Pengawas LH terhadap usaha yang izin lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	3,33	6,36	8,06	25	310,10	3,33	3,33	100

			Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	yang diterbitkan oleh Pemda								
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase MHA, Kearifan Lokal yang terkait PPLH, yang diakui keberadaannya (%)	2,27	n/a	1,14	17,05	1.495,6	2,27	1,43	63
			Kegiatan : Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional terkait PPLH yang diakui	11,36	n/a	1	15	1500	11,36	11,36	100
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan diklat	23,08	n/a	20	0	0	23,08	23,08	100
			Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan,	Persentase Mitra yang mendapat pendidikan dan	100	0	5	0	0	100	100	100

			Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pelatihan								
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Masyarakat / Garing Dunia Usaha / Garing Dunia Pendidikan yang Berprestasi (%)	33,33	20	21,74	20	91,90	33,33	20	60,01
			Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan tingkat Kabupaten	15	22,73	1	3	300	15	15	100
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus Lingkungan (%)	100	80	100	100	100	100	100	100
			Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan	Persentase Pengaduan/Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti	100	80	2	7	350	100	100	100

			Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota									
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	1,30	1,30	22,22	19,75	88,80	1,30	1,66	127,69
			Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R	14,23	14,22	9333	8103,01	14,23	14,23	17,10	120,17

Tabel 2.9  
Pencapaian Kinerja Pengelenggaraan DLH  
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Renstra						Realisasi Capaian					Proyeksi Tahun 2021	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang trintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kabupaten			12,5	12,50	12,50	25			37,50	11,25	12,50				
2	Indeks Pencemaran Status Mutu Air			7,16	2,59	2,59	2,59			2,75	1,76	2,01				
3	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			1,37	1,38	1,38	1,38			1,39	1,40	1,39				
4	Persentase Lembaga/ Perusahaan penghasil Limbah B3 yang Diawasi			0,02	100	100	100			90	100	100				
5.	Persentase Ketaatan Pelaku			40	64	64	66			4,35	60	51,20				

	Usaha dan / Atau Kegiatan															
6.	Persentase MAH Kearifan Lokal yang terkait PPLH yang diakui keberadaannya			1,14	1,14	2,27	3,41			0,19	1,42	1,43				
7.	Persentase Lembaga Masyarakat yang diberikan Diklat			n/a	23,08	23,08	23,08			n/a	28,85	23,08				
8.	Persentase Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan yang berprestasi			21,74	33,33	33,33	33,33			20	25	20				
9.	Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan			100	100	100	100			100	100	100				
10.	Persentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi			22,22	1,3	1,3	1,3			19,67	2,83	1,66				

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Hal dimaksud dapat dilihat dalam beberapa regulasi antara lain:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah kabupaten Selayar;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 128 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Disamping itu, Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai RPJMD 2021-2026 adalah **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**. Salah satu Misi sebagai langkah kongkrit untuk mewujudkan Visi tersebut yaitu **“Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup”**. Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu perangkat daerah berkewajiban untuk memberi kontribusi terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah.

Kegiatan lingkungan yang telah diselenggarakan selama ini lebih dititik beratkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan serta pengelolaan persampahan. Dinas Lingkungan Hidup kedepan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang teraihnya predikat Kabupaten Adipura melalui program perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI), pengendalian limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan/izin PPLH, pengakuan keberadaan MHA/kearifan lokal yang terkait dengan PPLH, peningkatan

pendidikan/pelatihan/penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, penanganan pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Adapun hambatan internal yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, masih lemahnya system informasi yang memuat data base lingkungan serta sarana prasarana pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup yang belum memadai. Sedangkan hambatan eksternal yaitu kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan hidup serta kesadaran dan kepedulian masyarakat yang masih minim terhadap lingkungan.

Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup memiliki berbagai peluang yang dapat menunjang peningkatan kinerja pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup. Peluang-peluang dimaksud, antara lain :

1. Adanya kebijakan dari Bupati/Wakil Bupati terpilih yang menjadikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai salah satu kegiatan yang harus disukseskan.
2. Pelaksanaan diklat teknis dan fungsional oleh aparat lingkungan hidup yang dilaksanakan BLHD Provinsi, PPE Sumapapua dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkesinambungan;
3. Serta regulasi bidang lingkungan hidup yang jelas.

### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Bersadarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam pelaksanaan Renstra Dinas lingkungan Hidup Tahun 2021-2026, diperkirakan akan menghadapi beberapa isu-isu strategis antara lain :

- a. Kesesuaian pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. Peningkatan kesadaran Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Peningkatan penegakan hukum terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki persetujuan lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

- e. Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan melalui perluasan wilayah pelayanan kebersihan, penanganan sampah dari laut dan pengelolaan sampah menjadi potensi ekonomi;
- f. Peningkatan mutu laboratorium Lingkungan Hidup melalui akreditasi yang dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan mendukung indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional;
- g. Peningkatan usaha adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan degradasi ekosistem dan peningkatan lahan kritis dan kemerosotan keanekaragaman hayati;
- h. Ekosistem mangrove mempunyai nilai penting sebagai penyangga sistem kehidupan, pencegah dampak kerusakan lingkungan, mitigasi risiko bencana, memiliki nilai keanekaragaman flora dan fauna dan fungsi jasa lingkungan. Upaya konservasi ekosistem mangrove dapat mengurangi 10-31% pelepasan emisi karbon tahunan dari sektor penggunaan lahan di Indonesia, sehingga dibutuhkan adanya :
  - 1. strategi pengelolaan ekosistem mangrove;
  - 2.pengendalian, pemanfaatan dan konservasi ekosistem mangrove dengan memperhatikan prinsip kelestarian ;
  - 3. rencana rehabilitasi ekosistem mangrove;
  - 4. penguatan kelompok kerja mangrove dan penguatan forum peduli mangrove; dan
  - 5. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara temuan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD dengan menjurru kepada perintah ptogram atau kegiatan dan hasil pembahasan awal renja berdasarkan rancangan Renja DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.

Setelah membandingkan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD untuk tahun 2025 menunjukkan perbedaan dalam perhitungan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada DLH ternyata menunjukkan kebutuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pagu indikatif pada rancangan awal RKPD

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan diperoleh melalui penelitian dan pengamatan lapangan, kunjungan kerja Kepala Daerah, pelaksanaan musrenbang kecamatan/kabupaten serta melalui proses pembahasan Komisi DPRD sebagai wakil rakyat.

Untuk lebih jelasnya, Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel 2.10 sesuai Format terlampir pada Juknis.

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Cat.
I	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
A	Pengelolaan Sampah				
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Ko	Kepulauan Selayar	Jumlah Mesin Pencacah Plastik	2 Unit	
		Kepulauan Selayar	Jumlah Mesin Pres	2 Unit	
		Kepulauan Selayar	Jumlah Mesin Pengayak	5 Unit	
		Kepulauan Selayar	Jumlah Mesin Pencacah Organik	5 Unit	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN DLH

#### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat. Perencanaan yang ideal harus mempunyai prinsip partisipatif karena masyarakat yang akan memperoleh manfaatnya maka masyarakat juga harus turut serta dalam prosesnya melalui penyelenggaraan musrenbang RPJMD. Sehingga fungsi perencanaan sebagai alat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dapat tercapai.

Dibidang sumber daya alam dan Lingkungan Hidup memiliki peran ganda yaitu sebagai model pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penunjang kehidupan selanjutnya. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,80 % terhadap Produk Domestik Bruto dan 48% terhadap penyerapan Tenaga Kerja. Namun, Pengolahan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun.

Sasaran Visi Indonesia Emas Menuju 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan tercermin dalam 5 sasaran visi :

1. Pendidikan perkapita setara negara maju
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh didunia intern meningkat
4. Daya saing SDM meningkat
5. Intensitas Emisi GRK menurun menuju Net Zero Emisi

Tema dan arah kebijakan RPJMN 2025-2029 yaitu :

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan sosial, budaya dan ekonomi

Isu strategis ketahanan sosial budaya dan ekologi :

1. Isu agama
2. Isu budaya
3. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
4. Energi
5. Pangan
6. Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut meliputi rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran dalam tahun 2025.

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan gambaran tentang realitas masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Visi tersebut disusun dengan memperhatikan visi misi Bupati/Wakil Bupati dan arah pembangunan daerah jangka menengah serta isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bertolak dari visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Adapun sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta pencapaian sasaran SKPD, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, mempunyai 10 (sepuluh) program dengan 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan.

Untuk lebih jelasnya, Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 3.1. sebagai Lampiran (sesuai Format terlampir pada Juknis).

Tabel 3.1 :  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar dasar				10.150.753.000,00				17.758.992.334,00
2	11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				10.150.753.000,00				17.758.992.334,00
2	11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capain Kinerja	Benteng	71,51%	5.606.352.900,00	DAU		72,31%	8.522.590.529,00
		Persentase Capain Kinerja Keuangan	Benteng	91,00%				95,00%	
2	11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi	Benteng	100	122.000.000,00	DAU		100	134.000.000,00

						Kinerja yang tersusun							
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Benteng	3 Dok	8.875.700.00	DAU		3 Dok	50.000.000.00
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Benteng	1 Dok	3.610.000.00	DAU		1 Dok	8.000.000.00
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Benteng	1 Dok	3.099.400.00	DAU		1 Dok	5.000.000.00
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Benteng	1 Dok	3.610.000.00	DAU		1 Dok	8.000.000.00
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Benteng	1 Dok	3.099.400.00	DAU		1 Dok	5.000.000.00



						Keuangan Akhir Tahun SKPD							
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Benteng	12 Laporan	9.226.900,00	DAU		12 Laporan	70.000.000,00
2	11	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Administrasi BMD DLH yang tersusun</b>	<b>Benteng</b>	<b>100%</b>	<b>16.604.000,00</b>	<b>DAU</b>			<b>65.000.000,00</b>
2	11	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Benteng	4 Laporan	6.604.000,00	DAU		4 Laporan	35.000.000,00
2	11	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Benteng	4 Laporan	10.000.000,00	DAU		4 Laporan	30.000.000,00
2	11	01	2.04		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase Laporan Administrasi Pendapatan DLH yang Tersusun</b>	<b>Benteng</b>	<b>85,71%</b>	<b>172.820.100,00</b>	<b>DAU</b>			<b>222.000.000,00</b>

2	11	01	2.04	04	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Benteng	1 Dok	1.854.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
2	11	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Benteng	1 Dok	166.612.100,00	DAU		1 Dok	205.000.000,00
2	11	01	2.04	07	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Benteng	12 Dok	4.354.000,00	DAU		12 Dok	12.000.000,00
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Persentase laporan administrasi kepegawaian DLH yang tersusun</b>		<b>100%</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>DAU</b>			<b>153.000.000,00</b>
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Benteng	0 Paket	0,00	-		0 Paket	60.000.000,00
2	11	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Benteng	4 Dok	8.000.000,00	DAU		4 Dok	30.000.000,00
2	11	01	2.05	04	Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	Benteng	2 Dok	8.000.000,00	DAU		2 Dok	30.000.000,00

					Kepegawaian	Informasi Kepegawaian							
2	11	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Benteng	2 Dok	8.000.000,00	DAU		2 Dok	20.000.000,00
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasai umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum yang tersedia</b>		<b>100%</b>	<b>245.829.000,00</b>	<b>DAU</b>			<b>245.000.000,00</b>
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Benteng	50 Paket	12.000.000,00	DAU		50 Paket	15.000.000,00
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Benteng	10 Paket	9.002.000,00	DAU		10 Paket	10.000.000,00
2	11	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Benteng	3 Dok	7.200.000,00	DAU		3 Dok	10.000.000,00
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Benteng	10 Laporan	15.000.000,00	DAU		10 Laporan	30.000.000,00
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Benteng	136 Laporan	202.627.000,00	DAU		136 Laporan	180.000.000,00

						Konsultasi SKPD								
2	11	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah</b>	Benteng	43,59	64.881.300,00	DAU		43,59	202.000.000,00	
2	11	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Benteng	0 Unit	0,00	DAU		3 Unit	120.000.000,00	
2	11	01	2.07	05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mabel yang Disediakan	Benteng	6 Unit	25.700.000,00	DAU		6 Unit	40.000.000,00	
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Benteng	3 Unit	39.181.300,00	DAU		3 Unit	42.000.000,00	
2	11	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Jasa Penunjang DLH yang tersedia</b>		100%	334.937.400,00	DAU			2.917.590.529,00	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benteng	350 Laporan	10.278.200,00	DAU		350 Laporan	30.000.000,00	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Benteng	3 Laporan	108.160.000,00	DAU		3 Laporan	70.000.000,00	



2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Benteng	22 Unit	15.300.000,00	DAU		22 Unit	85.000.000,00
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Benteng	1 Unit	119.130.000,00	DAU		1 Unit	50.000.000,00
2	11	02			<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase rencana perlindungan dan pengelolaan LH yang terintegrasi dalam rencana pembangunan Kabupaten (Penunjang)</b>	Selayar	37,50%	86.648.000,00	DAU		37,50%	430.281.801,00
2	11	02	2.01		<b>Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota</b>	<b>Persentase rekomendasi rencana PPLH terevaluasi</b>	Selayar	37,50%	44.336.000,00	DAU		37,50%	335.000.000,00
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Selayar	1 Dok	20.000.000,00	DAU		1 Dok	60.000.000,00

2	11	02	2.02	0004	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang Dilakukan Peninjauan Kembali	Selayar	1 Dok	24.336.000,00	DAU		1 Dok	25.000.000,00
2	11	02	2.02	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang Berisi Arahan/Muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan Mengakomodir Arahan RPPLH Provinsi	Selayar	0 Dok	00,00	DAU		1 Dok	250.000.000,00
2	11	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (IKLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang terintegritasi dalam Rencana Pembangunan Kabupaten (Penunjang)</b>	<b>Selayar</b>	<b>32%</b>	<b>42.312.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>32%</b>	<b>95.281.799,00</b>
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen IKLHS/RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Selayar	1 Dok	0,00	DAU		1 Dok	0,00

2	11	02	2.02	0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang Dipantau dan Dievaluasi	Selayar	1 Dok	22.312.000,00	DAU		1 Dok	24.000.000,00
2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang Berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Selayar	1 Dok	20.000.000,00	DAU		1 Dok	71.281.799,00
2	11	03			<b>Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks Pencemaran Status Mutu Air (Perioritas)</b>	<b>Selayar</b>	<b>2,59</b>	<b>175.912.600,00</b>	<b>DAU</b>		<b>2,59</b>	<b>2.166.965.608,00</b>
2	11	03	2.01		<b>Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengujian yang Memenuhi Mutu yang Baku</b>	<b>Selayar</b>	<b>10%</b>	<b>123.037.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>10%</b>	<b>1.225.965.608,00</b>
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media	Jumlah Dokumen uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Selayar	1 Dok	11.125.600,00	DAU		1 Dok	165.000.000,00

					Tanah,Air,Udara dan Laut								
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Selayar	1 Dok	16.504.000,00	DAU		1 Dok	10.000.000,00
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah Pengujian yang Dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan	Selayar	20 Dok	95.407.400,000	DAU		20 Dok	1.050.965.608,00
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota</b>	<b>Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH</b>	<b>Selayar</b>	<b>25%</b>	<b>9.025.600,00</b>	<b>DAU</b>		<b>25%</b>	<b>220.000.000,00</b>
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Selayar	2 Laporan	9.025.600,00	DAU		2 Laporan	220.000.000,00

2	11	03	2.03		<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH</b>	Selayar	0,0047	43.850.000,00	DAU		0,0047	721.000.000,00
2	11	03	2.03	0006	Pelaksanaan Remediasi	Luas area yang dilakukan remediasi di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Selayar	2 Ha	20.850.000,00	DAU		20 Ha	306.000.000,00
2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Selayar	2 Ha	15.000.000,00	DAU		1 Dok	270.000.000,00
2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar dengan Dampak di Kabupaten/Kota	Selayar	2 Kegiatan	8.000.000,00	DAU		1 Dok	145.000.000,00
2	11	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati</b>	Selayar	1,38%	586.491.000,00	DAU		1,38%	1.917.302.763,00

2	11	04	2.01		<b>Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota</b>	<b>Persentase taman keanekaragaman hayati yang dikelola</b>	Selayar	2,31%	586.491.000,00	DAU		2,31%	1.917.302.763,00
2	11	04	2.01	0003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Selayar	5 Ha	301.991.000,00	DAU		5 Ha	382.000.000,00
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Selayar	20 Ha	234.500.000,00	DAU		20 Ha	1.115.000.000,00
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarpras Taman KEHATI yang Dikelola	Selayar	2 Unit	20.000.000,00	DAU		5 Unit	125.302.763,00
2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Selayar	1 Unit	15.000.000,00	DAU		1 Unit	115.000.000,00
2	11	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN</b>	<b>Persentase Lembaga/ Perusahaan Penghasil Limbah B3 yang diawasi (Penunjang)</b>	Selayar	100%	27.640.500,00	DAU		100%	119.831.423,00

					<b>BERACUN (LIMBAH B3)</b>								
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyimpana sementara limbah B3</b>	<b>Persentase limbah B3 yang disimpan sementara</b>	<b>Selayar</b>	<b>9,25%</b>	<b>27.640.500,00</b>	<b>DAU</b>		<b>9,25%</b>	<b>119.831.423,00</b>
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritasi secara Elektronik	Selayar	5 Dok	11.500.500,00	DAU		5 Dok	65.000.000,00
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Selayar	5 Laporan	16.140.000,00	DAU		5 Laporan	54.831.423,00
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>06</b>			<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan</b>	<b>Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan (Perioritas)</b>	<b>Selayar</b>	<b>68%</b>	<b>64.537.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>68%</b>	<b>125.278.306,00</b>

					<b>Izin PPLH</b>								
2	11	06	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rasio Pejabat Pengawasan LH terhadap Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda</b>	Selayar	23,33%	64.537.000,00	DAU		23,33%	125.278.306,00
2	11	06	2.01	0001	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Selayar	20 Dok	18.847.000,00	DAU		20 Dok	38.278.306,00
2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Selayar	3 Orang	25.140.000,00	DAU		3 Orang	56.000.000,00
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi	Selayar	20 Badan Usaha	20.550.000,00	DAU		35 Laporan	31.000.000,00

					Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
2	11	07			<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	Persentase MHA, kearifan lokal yang terkait PPLH yang diakui keberadaannya (Penunjang)	Selayar	4,55%	15.357.000,00	DAU		4,55%	32.661.297,00
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional terkait PPLH yang Diakui	Selayar	11,36%	15.357.000,00	DAU		11,36%	32.661.297,00

2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisioanal dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Selayar	1 Dok	15.357.000,00	DAU		1 Dok	32.661.297,00
2	11	08			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat</b>	Selayar	23,08%	15.000.000,00	DAU		23,08%	65.362.594,00
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Persentase mitra yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Selayar	100%	15.000.000,00	DAU		100%	65.362.594,00

					<b>tingkat daerah kabupaten/kota</b>								
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Selayar	1 Dok	15.000.000,00	DAU		1 Dok	65.362.594,00
2	11	09			<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan yang berprestasi</b>	<b>Selayar</b>	<b>33,33%</b>	<b>36.089.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>33,33%</b>	<b>16.340.649,00</b>
2	11	09	2.01		<b>Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan yang mendapat penghargaan tingkat kabupaten</b>	<b>Selayar</b>	<b>15,00%</b>	<b>36.089.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>15,00%</b>	<b>16.340.649,00</b>
2	11	09	2.01	01	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan yang dinilai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Selayar	20 Entitas	15.585.940,00	DAU		20 Entitas	16.340.649,00

2	11	10			<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase penanganan pengaduan/kasus lingkungan</b>	Selayar	100%	20.000.000,00	DAU		100%	38.128.180,00
2	11	10	2.01		<b>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota</b>	<b>Persentase pengaduan/kasus lingkungan yang ditindaklanjuti</b>	Selayar	100%	20.000.000,00	DAU		100%	38.128.180,00
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti	Selayar	2 Pengaduan	10.000.000,00	DAU		2 Pengaduan	16.500.000,00
2	11	10	2.01	0006	Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerapan Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan yang Tidak Taat dan	Selayar	1 Perkara	10.000.000,00	DAU		1 Dok	21.628.180,00

						Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	11	11			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase pengelolaan persampahan yang bernilai ekonomi</b>	Selayar	1,3%	3.516.725.000,00	DAU		1,3%	4.324.229.184,00	
2	11	11	2.01		Pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah dengan prinsip 3R	Selayar	14,35%	3.516.725.000,00	DAU		14,27%	4.324.229.184,00	
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Selayar	5 Klmpk	10.000.000	DAU		5 Klmpk	35.000.000	
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota. Pengelolaan	Selayar	3 Dok	20.000.000,00	DAU		3 Dok	58.000.000,00	

						Persampahan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada							
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST SPA Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Selayar	5 Unit	188.035.000,00	DAU		5 Unit	2.262.979.584,00
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kab/Kota	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pengangkutan	Selayar	6000 Ton	2.815.804.800,00	DAU		6000 Ton	1.143.249.600,00
2	11	11	2.01	0012	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah Fasilitas Penanganan sampah yang Beroperasi dan Terpelihara dengan Baik	Selayar	1 Dok	13.090.000,00	DAU		1 Dok	30.000.000,00
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Timbulan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui	Selayar	0 Laporan	00,00	DAU		1 Laporan	383.970.000,00

						Pembatasan Timbulan Sampah							
2	11	11	2.01	0020	Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota	Selayar	6000 Ton	202.344.000,00	DAU		6000 Ton	391.030.000,00
2	11	11	2.01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota Termasuk untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Selayar	3 Dokumen	15.000.000,00	DAU		3 Dokumen	20.000.000,00
								TOTAL	<b>10.150.753.000,00</b>				<b>17.758.992.334,00</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLH

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program DLH Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD. Sedangkan kegiatan merupakan aktivitas-aktivitas yang terukur bersifat tahunan dari program-program yang telah ditetapkan.

Program dimaksud hanya program lokalitas kewenangan DLH Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta penataan kepegawaian dan pelayanan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Program ini dimaksudkan untuk mengevaluasi konsekuensi dampak lingkungan dari produk dan proses-prosesnya terhadap keselamatan pekerja, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

Kegiatan :

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota;
- b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Program ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kualitas lingkungan hidup kabupaten dengan mengendalikan kerusakan dan pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kegiatan :

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)  
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas ekosistem dalam keanekaragaman hayati masing-masing species yang dapat membantu keberlanjutan alam.  
Kegiatan :
  - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)  
Program ini dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).  
Kegiatan :
  - a. Penyimpanan Sementara Limbah B3;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)  
Program ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.  
Kegiatan :
  - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.  
Program ini dimaksudkan untuk menginventarisasi tradisi atau pengetahuan local tentang hal-hal tabu (rahasia) dan sakral dalam pelestarian fungsi atau pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.  
Kegiatan :
  - a. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat  
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dan perorangan dalam mengembangkan dan mengelola usaha di bidang lingkungan hidup.  
Kegiatan :
  - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.  
Program ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada kelompok masyarakat dan perorangan atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup dan/atau telah berhasil mengembangkan usaha bidang lingkungan hidup.  
Kegiatan :
  - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.  
Program ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi awal, menilai sifat pengaduan dan/atau masalah serta menindaklanjuti setiap keluhan atau konflik lingkungan hidup.  
Kegiatan :
  - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
11. Program Pengelolaan Persampahan  
Program ini dimaksudkan untuk mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan tidak membahayakan bagi lingkungan hidup.  
Kegiatan :
  - a. Pengelolaan Sampah;
  - b. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta;
  - c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta.

Dari berbagai program yang direncanakan Tahun 2025, terdapat 10 program yang termasuk urusan pemerintahan wajib dengan pelayanan non dasar dan 1 program yang terfokus pada penunjang urusan pemerintahan daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, maka pendanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 membutuhkan dana/pagu indikatif sebanyak Rp.10.150.753.000,- (sepuluh milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang sumber pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

## BAB V

### PENUTUP

Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa mendatang telah menetapkan beberapa kebijakan strategis yang perlu mendapat perhatian, antara lain dengan :

1. Peningkatan anggaran secara bertahap setiap tahun anggaran;
2. Pengadaan sarana prasarana pengelolaan lingkungan hidup;
3. Peningkatan kualitas aparatur lingkungan hidup melalui pelaksanaan Diklat teknis dan fungsional serta pengangkatan pegawai baru;
4. Penataan dan penyempurnaan pedoman teknis penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya berkenaan dengan kegiatan yang mempunyai dampak secara langsung kepada masyarakat.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025. Semoga Renja ini dapat berfungsi sebagai bahan masukan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2025.

Benteng, 05 Juni 2024

KEPALA DLH,



**MUHAMMAD TAUFIK KADIR, ST.M.M**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720303 200604 1 020

